Aktualisasi nilai-nilai pancasila dalam syarat pengangkatan hakim pengadilan agama berdasarkan pasal 13 Undang-Undang No.3 Tahun 2006

henry halim

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Riau

Jl.Azki Aris Kp.Besar Rengat

henryhalim.stihriau.ac.id

Abstrak

Nilai-nilai Pancasila meresap dalam setiap sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia. Sila Pertama Pancasila mengandung makna bahwa sendi kehidupan bangsa Indonesia bernapaskan “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kemanusiaan bermakna bahwa setiap jiwa bangsa Indonesia, akan memandang penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan secara adil dan beradab. Persatuan Indonesia akan bermakna bahwa setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara harus memperhatikan integritas bangsa dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaannya. Dalam setiap penyelesaian permasalahan bangsa harus diusahakan terwujudnya musyawarah untuk mufakat. Dan menguatkan tujuan untuk menciptakan keadilan bagi seluruh bangsa Indonesia sebagaimana nilai kelima Pancasila. Karena itu wajar setiap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan, selalu mengutamakan nilai-nilai Pancasila.

Kata Kunci: *Nilai-Nilai, Pancasila, bangsa, Negara*

A. Latar belakang

Pancasila merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Hal ini sudah kita ketahui bersama dalam pendidikan pancasila. Tanpa adanya jiwa, maka suatu bangsa hanya akan menjadi suatu yang tidak hidup dalam ruang lingkup ketataannya. Memang hukum akan senantiasa ada dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara ini, tetapi tanpa jiwa maka hukum hanya akan tidak dapat hidup ditengah-tengah masyarakat. Maka hukum adalah sebagaimana filsafat hukum mengatakan adalah jaringan nilai-nilai.

Nilai-nilai kita adalah nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat. Bukanlah kumpulan nilai individualism yang mementingkan kepentingan pribadi diatas kepentingan umum, dan bukan pula nilai sosialisme yang menitikberatkan pada kepemilikan bersama tanpa ada kepemilikan pribadi. Tetapi adalah nilai-nilai yang mengajarkan bahwa

kepentingan individu tidak boleh mengesampingkan kepentingan umum, artinya ada keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum, jadi tidak saling meniadakan antara keduanya. Nilai-nilai ini terdapat dalam Pancasila.

Menurut Tap MPRS No.XX/MPRS/1966 tentang tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang menjadi sumber hukum materil perundang-undangan Republik Indonesia ialah Pancasila. Artinya bahwa Pancasila merupakan sumber tertib hukum dalam arti sumber dari segala sumber hukum, hal ini mengandung pengertian bahwa pancasila merupakan pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, perikemanusiaan, keadilan social, perdamaian nasional dan mondial, cita-cita mengenai sifat, bentuk, dan tujuan Negara, cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari rakyat Indonesia.¹

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum juga mengandung pengertian bahwa semua sumber hukum yang berlaku di Indonesia, baik formil maupun materiil, seluruhnya bersumber pada Pancasila.²

Demikian pula dengan aturan-aturan yang terdapat dalam Undang-undang peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006. Bukan hanya peradilan agama, semua peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 2 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Ini berarti ikhwal tentang struktur organisasi pengadilan, sampai tentang hukum beracara dalam pengadilan dilakukan dengan berdasarkan Pancasila. Bahkan produk pengadilan yang berupa putusan dan penetapan mengandung penerapan atau aktualisasi nilai-nilai Pancasila.

Ambil bagian dari lingkungan peradilan, yakni hakim. Untuk diangkat menjadi seorang hakim, maka terikat dengan beberapa persyaratan. Dalam pasal 13 UU No.7 Tahun 1989 diubah dengan UU No.3 tahun 2006 sehingga pasal 13 berisi sebagai berikut:

“untuk dapat diangkat sebagai calon hakim pengadilan agama, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut”:

---

¹ Titik triwulan Dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011, Hal.35

² *Ibid*

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Beragama Islam
- c. Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa
- d. Setia Kepada Pancasila Dan UUD 1945
- e. Sarjana Syari'ah dan/atau sarjana hukum yang menguasai hukum islam
- f. sehat jasmani dan rohani
- g. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela
- h. bukan bekas anggota organisasi terlarang, partai komunis Indonesia termasuk organisasi massanya atau bukan orang yang terlibat langsung dalam gerakan 30 September/partai komunis Indonesia.

Berdasarkan pasal pada Undang-Undang diatas, maka nilai-nilai Pancasila dapat dicari dasarnya dalam aturan-aturan yang terdapat dalam pasal tersebut. Karena seperti yang dikatakan diatas, bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, maka pencarian sumber hukum pada aturan-aturan dalam suatu undang-undang ataupun aturan-aturan dibawahnya, akan bermuara pada suatu penemuan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana nilai-nilai pancasila itu meresap dan menjadi bagian dari suatu aturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Peradilan agama yang menyangkut tentang persyaratan untuk calon hakim pada peradilan agama.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam persyaratan calon hakim peradilan agama dalam pasal 13 UU No.3 Tahun 2006?

C. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang khusus membahas tentang aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam persyaratan calon hakim pengadilan agama berdasarkan pasal 13 UU No.3 Tahun 2006

b. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan dengan melakukan kajian terhadap bahan-bahan yang terkait dengan objek penelitian ini

c. Analisis data

Analisa data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis berdasarkan permasalahan penelitian yang diuraikan secara sistematis.

D. Pembahasan

Indonesia, nama suatu Negara, bentuk sistem, kumpulan orang-orang yang tercerai berai, namun satu karena persatuan untuk kesatuannya. Dengan meniadakan perbedaan suku, agama, ras, antar golongan, semuanya melebur dalam berbagai aspek. Pancasila adalah ideologinya yakni sebagai manusia yang berketuhanan, manusia yang berkemanusiaan, manusia yang mempersatukan manusia akan cita-cita kemanusiaannya, manusia yang bercakap-dengar dengan manusia lain, yang adalah cerminan dirinya dan manusia yang berkeadilan akan sesamanya manusia dengan adil sebagai dasar cita akan keadilan. Pancasila itulah yang mengikatnya untuk disebut “manusia Indonesia yang seutuhnya” satu saja yang terpilah maka prinsip/ideologi yang lain pula yang akan menjadikannya tidak satu.³

Begitu juga dengan seorang hakim. Peranan hakim adalah sebagai soko guru terakhir dari Negara hukum yang berdasarkan pancasila dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bertanggungjawab terhadap diri sendiri, bangsa, dan Negara. Karena itu, seorang hakim sebagai

---

³ Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2012, Hal.289

penegak hukum dan keadilan di dalam Negara yang berdasarkan Pancasila dituntut agar hakim harus mengakui dan percaya adanya Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agamanya masing-masing, yang kemudian harus memiliki kejujuran, tak terpengaruh, *sepi ing pamrih*, dan tabah, adil, tak berprasangka, selalu mencari keadilan, kebenaran, memutus perkara atas keyakinannya dan sanggup bertanggungjawab pada Tuhan Yang Maha Esa.⁴

Karena itu, untuk dapat diangkat sebagai seorang hakim dipengadilan agama, mensyaratkan seorang calon hakim itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagaimana dituntut pada seorang yang memiliki keimanan dan ketakwaan yang kuat, agar menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, maka seorang hakim yang memiliki keimanan dan ketakwaan yang kuat, tidak akan terpengaruh oleh kenikmatan dunia dengan mengabaikan kebenaran dan keadilan. Karena bagaimanapun juga mereka mengetahui bahwa keadilan itu lebih dekat dengan ketakwaan seseorang. Wajarlah kiranya orang yang diangkat menjadi seorang hakim adalah orang yang memiliki ketakwaan kepada Tuhan Yang maha Esa.

Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan praksis moral dari “ketuhanan Yang Maha Esa”, karena bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan dasar dari segala amal, maka hanya seorang hakim yang bekerja dengan ikhlas karena Tuhan sajalah yang akan mampu menegakkan kebenaran dan keadilan. Hanya dengan menuntut hati yang merasakan sisi kemanusiaan saja yang akan melahirkan sebuah putusan yang memperhatikan keadilan. Tanpa keadilan maka hukum tidak akan memiliki kekuatan. Bagaimana bisa hakim dapat mencapai sebuah putusan yang adil, maka hanya dengan sikap moral untuk menjadi hakim yang professional dan berintegritas yang tinggi sajalah yang akan memungkinkan hakim tersebut untuk membuat sebuah putusan yang berkeadilan.

Oleh karena itu, persyaratan untuk menjadi seorang hakim pengadilan agama yang mensyaratkan sarjana syari'ah atau sarjana hukum merupakan dasar agar output yang dihasilkan adalah terjaminnya mutu pekerjaan yang dijalankan oleh hakim.

Ilmu adalah cahaya, tanpa hal itu, maka seorang manusia akan menempuh jalan yang penuh dengan kegelapan. Begitu juga dengan seorang hakim, maka ilmu yang dimiliki oleh hakim, akan menjadi jalan bagi terwujudnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Bukankah orang yang

---

⁴ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Jakarta: Kencana, 2013, Hal.167

berilmu memiliki adab dalam kehidupannya. Untuk itu terlebih dahulu, ia akan bersikap adil dengan keyakinannya. Dikatakan bahwa hakim harus memutus sengketa berdasarkan dua alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim, maka bagaimana hakim memutus jika ia tidak mengetahui duduk perkaranya. Maka ilmu itu merupakan jalan untuk sampai pada sebuah keyakinan yang mantap. Dengan begitu, ia dapat membuat sebuah putusan yang mengandung nilai-nilai keadilan. Setelah adil dikatakan bahwa orang itu telah meletakkan adab pada praksis kemanusiaannya. Bukankah orang yang beradab adalah orang yang berlaku adil, dan *a contrario* bahwa orang yang tidak beradab adalah orang yang zalim terhadap orang lain.

Persatuan Indonesia, mensyaratkan bahwa siapa pun yang menjadi warga Negara Indonesia tanpa terkecuali harus lah menjunjung tinggi hukum. Pernyataan kesetiaan pada Pancasila dan UUD 1945 merupakan syarat untuk pengangkatan calon hakim pada pengadilan agama, yang merupakan upaya Negara dalam mempertahankan integritas bangsa agar tidak terpecah-pecah.

Kita sebagai bangsa Indonesia, terdiri dari berbagai latar belakang yang berbeda. Dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika menyatakan bahwa meskipun kita berbeda-beda tetapi tetap satu jua, merupakan pernyataan deklaratif yang mencerminkan kenyataan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Meskipun begitu, siapapun orangnya, yang hidup di bumi Indonesia, maka wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali. Hukum tidak mensyaratkan sikap diskriminasi, siapapun orangnya, maka selagi ia berkewarganegaraan Indonesia, dan memenuhi syarat hukum untuk diangkat menjadi hakim ataupun dalam jabatan tertentu, dipersilahkan untuk menduduki jabatan itu dalam batas-batas yang ditetapkan Undang-Undang.

Setia pada Pancasila juga berarti bahwa tidak ikut serta dalam upaya melakukan disintegrasi bangsa, dengan ikut pada organisasi yang terlarang, ataupun mengorganisasi perkumpulan yang dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintah Republik Indonesia.

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Mensyaratkan bahwa perkataan “perwakilan” bermakna dalam suatu Negara hukum Indonesia, ada suatu lembaga yang diberikan kekuasaan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Cukuplah beberapa orang yang memiliki kemampuan dalam spesialisasi bidang bertindak untuk dan atas nama kemaslahatan manusia. Mereka ini adalah wakil yang telah ditunjuk oleh Tuhan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Maka dari itu wakil ini hendaklah dari kalangan yang

memiliki sejumlah persyaratan yang dapat dipenuhi dan sesuai dengan kualifikasi yang diharapkan oleh Negara.

Adapun sejumlah syarat yang menjadi kriteria dalam pemilihan seorang hakim pada pengadilan agama itu merupakan tuntutan dari masyarakat agar orang-orang yang berada dalam tampuk kekuasaan yudikatif ini adalah orang-orang yang memiliki keahlian dan kemampuan untuk menjalankan profesinya, sehingga putusan yang dihasilkan benar-benar mengandung kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mensyaratkan bahwa apa yang menjadi tujuan Negara adalah menjadi bahan pemikiran dalam merumuskan kebijakan yang mengarah pada terwujudnya keadilan dalam segala aspek. Dan bahwasanya siapapun bisa atau mampu untuk menjadi apa yang dia inginkan, selama hal itu menjadi keinginannya dan memperjuangkannya. Keinginan yang akan mampu untuk mencapai hal tertinggi dalam hidupnya, termasuk menjadi seorang hakim. Tentunya menjadi seorang hakim akan menjadi bahan pemikiran dan renungan bagi siapa saja yang ingin mengambil profesi yang disebut sebagai aparat penegak hukum ini, untuk memilah kepribadian dan karakter apa saja yang dituntut oleh profesi itu. Karena itu tidak semua orang mampu menjalankan profesi itu, tergantung dari keinginannya dan disiplin diri yang ia jalankan.

Kalau lembaga peradilan agama sudah diisi oleh orang-orang yang memiliki kualifikasi yang sesuai standar kode etik dan undang-undang, maka output yang diharapkan adalah terwujudnya proses dan produk hukum yang berkeadilan.

Di Indonesia, keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar Negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia didasari dan dijiwai oleh Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, serta Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan.⁵ Jadi kelima sila ini saling berkaitan satu sama lain.

---

⁵ Agus Santoso, *Hukum, Moral Dan Keadilan*, Jakarta: Kencana, 2012, Hal.86

E. Kesimpulan

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, jadi apapun bentuk hukumnya baik itu materiil maupun formil, semua bermuara pada satu norma dasar yakni Pancasila yang merupakan sumber hukum materiil bangsa Indonesia. Dimulai dari Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan dasar dari sila-sila lainnya. Karena pada dasarnya semua sila akan terpenuhi dan terlaksana jika dan hanya jika semua aspek berlandaskan pada dasar yang satu yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka dari itu, seorang calon hakim yang akan ditunjuk adalah seorang yang memenuhi kualifikasi takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, jika kualifikasi ini terpenuhi maka akan menghasilkan out put yang sangat baik dalam pemenuhan rasa kemanusiaan, semangat integrasi bangsa, amanah dalam menjalankan kekuasaan dalam menegakkan kebenaran dan keadilan, serta terwujudnya suatu keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Santoso, *Hukum, Moral Dan Keadilan*, Jakarta: Kencana, 2012

Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2012

Titik Triwulan Dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011

Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Jakarta : Kencana, 2013